MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 225/DJMT.1/ST.KP7.1/VIII/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu melaksanakan kegiatan pendampingan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 105/DJMT/KEP/OT1.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Penetapan Tim Implementasi dan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :
1. Widodo, S.H./ 11970001000367, Kolonel Chk, Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis Ditbinganisminmil;
2. K. G. Raegen, S.H., M.H./ 11070053480285, Mayor Chk, Hakim Yustisial;
3. Siti Purwanti, S.H./ 199507062022032004, Penata Muda (III/a), Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan.

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 14 sd. 16 Agustus 2024;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
PLT. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

ACH. JUFRI

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara